

KEDUDUKAN HAK SERVITUUT ATAS PENGISOLASIAN TANAH OLEH PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN

Ayu Sekar Mahesarani

Abstrak

Tanah merupakan sumber kehidupan. Setiap hak atas tanah melekat fungsi sosial sehingga berlaku mutlak terhadap tanah tersebut. Hak *servituut* merupakan suatu wujud fungsi sosial atas tanah yang diatur pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak *servituut* atau *erfdienstbaarheid* di dasari pada Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengisolasian tanah merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan fungsi sosial sehingga merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak *servituut* menurut UUPA dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap masyarakat yang tidak bersedia memberikan pekarangannya untuk kepentingan umum dan akibat hukum apabila pengisolasian tanah oleh pemegang Hak Guna Bangunan tetap dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Hak *Servituut*, Fungsi Sosial, Hak Guna Bangunan.

POSITION OF SERVITUUT RIGHTS OVER THE LAND INSULATION BY HOLDER OF BUILDING RIGHTS

Ayu Sekar Mahesarani

Abstract

Land is the sources of life. Every land right is attached to a social function so that it applies indefectible to that land. . Servituut rights is a manifestation of the social function of the land based on article 6 Law Number 5 of 1960 concering basic regulations on agrarian principles (UUPA). Servituut rights or erfdiestbaarheid is based on article 674 until article 710 Indonesian civil code Land Insulations are illegal act by not performing social functions. Aim: This study aims to find out the position of servituut rights based on basic regulations on agrarian principles and Indonesian civil codes toward people that unwilling to giving their land for social function and law consequences of insulation by holder of building rights still carried out. Methode: This study using normative juridical research methode. Data was derived from primary, secondary and tertiary sources which are analyzed descriptively. This study uses library research and interview with the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency.

Key Words: *Servituut Rights, Social Functions, Building Rights.*